PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Republika Hari: Kamis Tanggal: 30 April 2015 Halaman: 16

Pembayaran PBB Bisa Dilakukan di RW

■ Yulianingsih

YOGYAKARTA — Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Yogyakarta sekarang ini bisa dilakukan melalui rukun warga (RW) masing-masing. Pemerintah setempat mengambil langkah ini untuk semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak.

Cara ini juga dilakukan untuk mengejar target realisasi PBB tahun ini sebesar Rp 48 miliar. "Jatuh tempo pembayaran PBB masih cukup lama, namun kita melakukan 'jemput bola' agar lebih maksimal," kata Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Tugiyarta, Rabu (29/4).

Tugiyarta mengatakan, program tersebut guna mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak. Sehingga, wajib pajak tidak perlu langsung membayar melalui loket bank. Untuk mekanisme pembayaran PBB di tingkat RW tersebut, kata dia, diserahkan ke masing-masing kelurahan. DPDPK nantinya akan menunggu konfimasi informasi dari kelurahan terkait pengaturan jadwal pembayaran pajak.

Menurut Tugiyarta, pelaksanaannya tidak perlu mendekati jatuh tempo masa pembayaran. Seperti di Kampung Darakan, Kelurahan Prenggan, Kotagede, yang sudah menggelar pekan pembayaran. Setelah adanya pembayaran, kata dia, bukti setoran asli akan diserahkan kepada wajib pajak melalui kelurahan. "Nanti petugas kami yang akan mendatangi ke tiap RW jika kelurahan sudah mengeluarkan jadwal," ujar dia.

Program jemput bola pembayaran PBB di tingkat RW ini pertama kali digelar tahun lalu. Tugiyarta menilai respons masyarakat cukup bagus terhadap langkah tersebut. Antrean pembayaran pajak saat mendekati jatuh tempo pun, kata dia, menjadi lebih minim.

Selain pekan pembayaran hingga RW, DPDPK juga sudah menyiapkan program jemput bola di setiap kecamatan. Menurut Tugiyarta, langkah tersebut baru akan dilakukan saat mendekati jatuh tempo pembayaran pada September mendatang. "Realisasi PBB hingga triwulan pertama masih rendah, yakni Rp 4,3 miliar. Kecenderungan masyarakat memang baru akan membayarkan saat mendekati jatuh tempo," kata dia.

Seluruh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB sudah didistribusikan ke seluruh wajib pajak. Jumlahnya mencapai 92.051 orang. Jika SPPT PBB ini hilang, maka wajib pajak dapat meminta salinan ke DPDPK. Namun, sebelumnya wajib pajak harus melampirkan surat laporan kehilangan dari kepolisian.

■ ed: irfan fitrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005